

PENGARUH REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA MODAL TERHADAP SELISIH PERUBAHAN ANGGARAN (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu)

Athirah Utami

thyra_chapster@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This aim of this research is to determine and analyze: 1) officials' expenditure realization, goods and services expenditure, and capital expenditure on budget variances on the governmental units in palu city, 2) significant impact of officials' expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure simultaneous on budget variances on the governmental units in palu city, 3) significant partial impact of officials' expenditure on budget variances on the governmental units in palu city, 4) significant partial impact of goods and services expenditure on budget variances on the governmental units in palu city, 5) significant partial impact of capital expenditure on budget variances on the governmental units in palu city. The sampel of 25 governmental units in Palu City area is chosen through purposive sampling method. Method analysis used is quantitative and multiple linier regressions analysis. The result show that officials' expenditure realization, goods and services expenditure, and capital expenditure simultaneously have significant impact on budget variances on the governmental units in Palu City. Partial tests show that officials' expenditure realization and capital expenditure has in insignificant impact on budget variances on the governmental units in Palu City. The value of coefficient determinant of 0.605 indicates that 60.5% of budget variances is impacted by officials' expenditure realization, goods and services expenditure, and capital expenditure; while 39.5% is impacted by other variables that are not studied.

Keywords: *officials' expenditure realization, goods and services expenditure, capital expenditure and budget variances.*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasari oleh regulasi telah mengalami beberapa perubahan hingga sekarang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah meletakkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Hal ini membawa konsekuensi diserahkannya sebagian besar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan; kewenangan

memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan demikian, hubungan keuangan pusat-daerah menyangkut pembagian kekuasaan dalam pemerintah-an, dan hak mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah (bagaimana memperoleh dan membelanjakannya) (Halim : 2004).

Salah satu indikator suksesnya pemerintahan dapat dilihat pertanggung-jawaban anggaran pemerintah tercermin dalam laporan keuangan, salah satunya adalah Laporan

Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara penetapan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Sholihin dan Ratmono : 2015).

Komponen penting yang sering menjadi perhatian publik dalam LRA adalah belanja daerah. Belanja daerah menunjukkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Belanja daerah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 apabila diklasifikasikan menurut kelompok, belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Komposisi belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah dapat dijadikan indikator kualitas belanja daerah, yakni indikator belanja tidak langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Penelitian yang dipublikasikan tahun 2013 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia tentang laporan evaluasi belanja modal daerah menunjukkan bahwa realiasi penyerapan belanja daerah, khususnya belanja modal masih di bawah target.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Alokasi anggaran berikutnya yaitu belanja barang dan jasa yang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Belanja barang dan jasa bersifat rutin karena terjadi terus-menerus. Belanja ini timbul untuk menyediakan pengawasan dan jasa kepada semua unit yang ada dalam pemerintahan. Dana yang dialokasikan dalam belanja barang yaitu untuk pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Agar belanja barang dan jasa tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka harus memenuhi kriteria penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa yang memadai.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Dasar dari dapat dilakukannya perubahan APBD tersebut di atas sebagian besar merupakan dampak dari realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, seperti ketidaksesuaian dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran, saldo lebih anggaran tahun sebelumnya. Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 154 ayat (1), dinyatakan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d) keadaan darurat; dan e) keadaan luar biasa.

Pada umumnya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran, disebabkan karena adanya pos belanja yang tidak tercover, tidak terpenuhi maupun belanja yang sifatnya darurat. Selisih perubahan anggaran merupakan nilai anggaran belanja daerah setelah perubahan dikurangkan dengan anggaran pokok. Perubahan anggaran diusulkan oleh satuan kerja yang membutuhkan atau merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam penetapannya harus mempertimbangkan satuan kerja untuk merealisasikannya.

Anggaran belanja pokok merupakan jumlah anggaran belanja keseluruhan yang tercantum dalam APBD pokok atau awal tahun, yang ditetapkan dalam bentuk Perda tentang APBD sebelum memasuki tahun berkenaan (secara normatif ditetapkan paling lambat 31 Desember). Anggaran belanja setelah perubahan adalah anggaran belanja keseluruhan yang tercantum dalam Perda tentang perubahan APBD, yang ditetapkan selama tahun berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap selisih perubahan, 2) pengaruh signifikansi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal secara simultan terhadap selisih perubahan anggaran, 3) pengaruh signifikansi belanja pegawai secara parsial terhadap selisih perubahan anggaran, 4) pengaruh signifikansi belanja barang dan jasa secara parsial terhadap selisih perubahan anggaran, 5) pengaruh signifikansi belanja modal secara parsial terhadap selisih perubahan anggaran, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu.

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, 2) belanja pegawai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, 3) belanja barang dan jasa secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, 4) belanja modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat verifikatif (pengaruh) merupakan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:81). Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu sebanyak 87 SKPD. Sampel yang digunakan adalah data realisasi anggaran belanja daerah dan perubahan APBD tiap-tiap SKPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu yang dilakukan tidak secara acak (random) melainkan telah ditentukan sebelumnya sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2013 : 156). Kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian yaitu SKPD yang memiliki perubahan APBD belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dari tahun 2013 – 2015. Sehingga dari 87 SKPD terpilih 25 SKPD yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, menurut dimensi waktunya menggunakan data panel yaitu kombinasi antara data deret waktu (*time series*) untuk kurun waktu 2013-2015 serta data kerat lintang (*cross section*).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Variabel bebas (Independen) yang terdiri dari: Belanja Pegawai (X_1), Belanja Barang dan Jasa (X_2) dan Belanja Modal (X_3) serta Variabel terikat yaitu Selisih Perubahan Anggaran (Y). Definisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai (X_1) adalah kemampuan SKPD menyerap anggaran belanja pegawai dalam pelaksanaan program kerja pada Dinas Daerah di Kota Palu.

Belanja pegawai yang dimaksud adalah kelompok belanja langsung yang meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (Sari : 2010).

2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa (X2) adalah kemampuan SKPD Kota Palu menyerap anggaran belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan program kerja pada Dinas Daerah di Kota Palu. Menurut Halim (2004 : 71), jenis belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa.
3. Realisasi Belanja Modal (X3) adalah kemampuan SKPD menyerap anggaran modal barang dalam pelaksanaan program kerja pada Dinas Daerah di Kota Palu. Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakuk-an dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah penge-luaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
4. Selisih perubahan anggaran adalah merupakan selisih dari APBD setelah perubahan dengan anggaran pokok. Perubahan APBD dalam program kerja dan kegiatan dengan penambahan/ pengurangan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya dalam satu tahun anggaran (Abdullah : 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, *library research*, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini

memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, heterokedastisitas dan bebas dari autokorelasi.

2. Uji Regresi Berganda

Mengetahui pengaruh realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Selisih Perubahan Anggaran pada SKPD Kota Palu, maka Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dan data diolah dengan bantuan *software* SPSS. Model regresi linear berganda tersebut diatas bila diterapkan dalam model penelitian ini akan nampak sebagai berikut (Ghozali:2006):

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Selisih Perubahan Anggaran

β_0 = Konstanta (Intercep)

X₁ = Realisasi Belanja Pegawai

X₂ = Realisasi Belanja Barang dan Jasa

X₃ = Realisasi Belanja Modal

e = Kesalahan Pengganggu (error)

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu. Realisasi anggaran belanja pegawai merupakan salah satu indikator besarnya serapan anggaran dan dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan kebijakan anggaran yang akan datang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2013 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu rata-rata

mencapai 93,97%, seperti tergambar pada Tabel:

Tabel 1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	2.273.744.000	2.643.959.000	2.446.529.000	92,53
2	Dinas Kesehatan	4.535.701.999	4.304.610.000	3.928.257.000	91,26
3	RSU Anutapura	7.101.316.955	9.031.040.000	8.739.081.941	96,77
4	Dinas Pekerjaan Umum	1.111.530.000	1.217.620.000	1.044.870.000	85,81
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	1.240.520.000	1.424.920.000	1.239.830.000	87,01
6	Kantor Pemadam Kebakaran	590.125.000	953.600.000	953.200.000	99,96
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	3.004.920.000	3.098.810.001	2.931.185.000	94,59
8	DISHUBKOMINFO	1.353.090.000	1.482.755.000	1.481.715.000	99,93
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	4.942.934.000	5.424.944.000	5.260.964.500	96,98
10	BLH	369.850.000	456.100.000	439.850.000	96,44
11	DISDUKCAPIL	458.051.500	538.149.800	536.649.800	99,72
12	Badan KB & PP	856.250.000	975.495.000	959.565.000	98,37
13	Dinas Pemuda & Olahraga	472.665.000	488.515.000	483.211.000	98,91
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	1.379.435.000	1.521.935.000	1.305.440.000	85,78
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.305.358.000	1.887.118.000	1.886.362.000	99,96
16	Sekretariat Daerah	6.705.708.300	9.498.768.300	7.343.464.000	77,31
17	DPPKAD	6.627.605.400	7.831.986.900	5.973.348.900	76,27
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	663.700.000	670.200.000	638.550.000	95,28
19	BKD	693.210.000	762.298.000	757.178.000	99,33
20	BPBD	215.600.000	306.200.000	304.320.000	99,39
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	772.820.000	859.225.000	824.200.000	95,92
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	1.443.853.500	1.404.596.000	1.353.927.000	96,39
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	685.329.000	764.154.000	764.154.000	100,00
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	2.513.030.000	2.576.230.000	2.423.522.000	94,07
25	Sekretariat DPRD	1.524.705.000	1.545.945.000	1.410.747.000	91,25

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Salah satu penyebab rendahnya persentasi capaian realisasi pada DPPKAD disebabkan beberapa kegiatan yang pendanaannya berasal dari perubahan APBD yang tidak terlaksana pada akhir tahun 2013, sehingga honorarium dan uang lembur pelaksana kegiatan juga tidak terbayarkan,

dengan kata lain output dari kegiatan tersebut tidak terealisasi.

Capaian realisasi belanja pegawai Tahun 2014 pada setiap SKPD Pemda Kota Palu berbeda satu sama lain, untuk lebih jelasnya dapat disimak pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	1.736.325.000	2.045.710.000	1.945.389.000	95,10
2	Dinas Kesehatan	11.049.390.830	6.494.646.000	6.494.546.000	100,00
3	RSU Anutapura	2.062.362.000	2.468.692.000	2.295.004.000	92,96
4	Dinas Pekerjaan Umum	1.373.295.000	1.486.735.000	1.403.315.000	94,39
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	1.092.980.000	1.237.690.000	1.172.200.000	94,71
6	Kantor Pemadam Kebakaran	1.011.230.000	1.368.100.000	1.368.100.000	100,00
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	2.100.129.500	1.804.106.500	1.773.936.500	98,33
8	DISHUBKOMINFO	1.254.878.000	1.557.169.000	1.553.190.000	99,74
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	6.368.472.000	6.588.723.500	6.219.965.900	94,40
10	BLH	443.350.000	430.850.000	414.200.000	96,14
11	DISDUKCAPIL	703.741.000	692.869.000	692.269.000	99,91
12	Badan KB & PP	617.258.000	637.478.000	633.088.000	99,31
13	Dinas Pemuda & Olahraga	326.550.000	330.600.000	327.100.000	98,94
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	1.269.985.000	1.654.705.000	1.577.663.000	95,34
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.908.028.000	3.117.268.000	3.116.788.000	99,98
16	Sekretariat Daerah	5.071.580.000	6.133.956.160	5.707.544.680	93,05
17	DPPKAD	7.130.136.400	7.990.795.400	7.189.845.900	89,98
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	669.500.000	666.350.000	654.675.000	98,25
19	BKD	716.771.000	1.038.854.000	1.010.780.000	97,30
20	BPBD	360.132.000	388.349.000	379.274.000	97,66
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	1.218.706.000	2.094.521.000	2.071.650.000	98,91
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	1.122.235.000	1.132.063.000	1.080.680.500	95,46
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	844.090.000	901.897.000	881.782.000	97,77
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	2.316.611.000	2.242.896.000	2.153.737.000	96,02
25	Sekretariat DPRD	1.802.395.000	1.965.525.000	1.736.507.000	88,35

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Salah satu penyebab rendahnya persentasi capaian realisasi pada Sekretariat DPRD dikarenakan adanya honorarium rapat anggota dewan yang capaian realisasinya di bawah anggaran yang telah disediakan.

Capaian realisasi belanja pegawai Tahun 2015 pada setiap SKPD Pemda Kota Palu berbeda satu sama lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	3.173.492.000	3.055.406.000	3.055.406.000	100,00
2	Dinas Kesehatan	3.956.392.000	4.326.537.000	4.302.232.000	99,44
3	RSU Anutapura	5.601.242.000	5.788.944.000	5.064.995.000	87,49
4	Dinas Pekerjaan Umum	1.521.395.000	1.647.715.000	1.572.815.000	95,45
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	1.420.215.000	1.463.575.000	1.463.575.000	100,00
6	Kantor Pemadam Kebakaran	1.749.600.000,00	1.817.509.000,00	1.817.119.000	99,98
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	2.105.392.000	2.824.253.484	2.824.253.484	100,00
8	DISHUBKOMINFO	1.165.539.000	1.485.999.000	1.485.999.000	100,00
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	5.627.652.000	6.335.813.000	5.857.721.300	92,45
10	BLH	309.610.000	301.610.000	301.606.000	100,00
11	DISDUKCAPIL	717.249.000	693.647.000	690.095.000	99,49
12	Badan KB & PP	315.135.000	405.600.000	404.220.000	99,66
13	Dinas Pemuda & Olahraga	351.380.000	363.380.000	361.380.000	99,45
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	904.028.000	922.008.000	845.508.000	91,70
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.256.466.000	2.518.936.000	2.518.856.000	100,00
16	Sekretariat Daerah	6.733.274.700	7.497.026.700	6.954.345.093	92,76
17	DPPKAD	6.424.095.800	5.996.342.400	5.702.430.400	95,10
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	720.105.000	720.105.000	719.355.000	99,90
19	BKD	855.955.000	929.688.500	899.378.500	96,74
20	BPBD	454.665.000	456.535.000	446.371.430	97,77
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	1.653.995.000	2.230.072.000	2.230.072.000	100,00
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	903.689.200	938.185.000	938.185.000	100,00
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	616.290.000	653.200.000	640.480.000	98,05
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	2.527.245.000	3.367.555.000	2.602.636.666	77,29
25	Sekretariat DPRD	1.905.625.000	1.716.650.000	1.541.983.000	89,83

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Salah satu penyebab rendahnya persentasi capaian realisasi pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM dikarenakan adanya

beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga honorarium dan uang lembur pelaksana kegiatan juga tidak terbayarkan,

dengan kata lain output dari kegiatan tersebut tidak terealisasi. Berdasarkan data terlihat bahwa realisasi anggaran belanja pegawai pada SKPD Pemda Kota Palu, mengalami gejala fluktuasi pada tiga tahun penelitian (2013-2015).

Deskripsi Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu

Realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja barang dan jasa SKPD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada 25 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2013 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu rata-rata mencapai 91,63%, seperti tergambar pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2013 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentasi Capaian (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan	13.583.286.446	14.990.255.120	13.858.125.084	92,45
2	Dinas Kesehatan	10.288.068.077	8.433.161.608	7.921.799.837	93,94
3	RSU Anutapura	43.018.309.715	42.687.028.994	41.590.956.797	97,43
4	Dinas Pekerjaan Umum	7.875.233.221	8.529.689.125	7.586.373.015	88,94
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	1.257.045.500	2.159.070.150	1.827.234.366	84,63
6	Kantor Pemadam Kebakaran	1.283.004.100	1.737.494.100	1.567.093.243	90,19
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	4.580.650.000	5.080.619.999	4.576.284.793	90,07
8	DISHUBKOMINFO	1.843.576.453	2.376.541.665	2.346.700.082	98,74
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	3.171.466.000	4.805.994.800	4.628.797.818	96,31
10	BLH	693.722.504	1.499.972.504	1.357.165.537	90,48
11	DISDUKCAPIL	947.625.900	1.019.672.700	968.450.590	94,98
12	Badan KB & PP	1.290.791.450	1.943.306.650	1.808.886.199	93,08
13	Dinas Pemuda & Olahraga	958.417.400	1.369.768.400	1.307.400.887	95,45
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	1.473.465.000	1.608.620.000	1.486.794.792	92,43
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	600.342.000	863.602.000	856.186.259	99,14
16	Sekretariat Daerah	15.123.783.731	20.672.826.200	17.341.291.478	83,88
17	DPPKAD	15.949.791.101	23.841.691.738	21.820.032.838	91,52
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	538.965.000	1.073.856.000	1.063.925.550	99,08
19	BKD	4.193.435.000	4.865.137.000	4.379.407.642	90,02
20	BPBD	560.334.000	814.744.400	743.599.156	91,27
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	1.026.433.961	2.002.778.461	1.848.906.091	92,32
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	5.042.860.660	5.664.525.660	4.968.639.882	87,72
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2.107.382.400	2.553.702.925	2.145.085.796	84,00
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	3.786.637.625	4.206.014.150	3.577.145.725	85,05
25	Sekretariat DPRD	14.197.228.350	18.257.364.404	16.000.891.682	87,64

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Rendahnya persentasi capaian realisasi pada Sekretariat Daerah disebabkan beberapa kegiatan yang pendanaannya berasal dari perubahan APBD seperti belanja jasa kantor, belanja jasa narasumber/tenaga ahli, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja jasa konsultasi, dan

perawatan kendaraan bermotor tidak terealisasi seluruhnya sesuai dengan perubahan APBD.

Capaian realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2014 pada setiap SKPD Pemda Kota Palu berbeda satu sama lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2014 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	8.790.040.829	11.085.484.650	9.342.499.972	84,28
2	Dinas Kesehatan	9.330.536.751	18.575.818.540	16.528.455.818	88,98
3	RSU Anutapura	53.586.954.460	78.629.638.100	77.089.700.984	98,04
4	Dinas Pekerjaan Umum	10.238.702.500	11.406.818.050	10.997.218.002	96,41
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	2.207.210.000	2.131.102.000	1.968.115.850	92,35
6	Kantor Pemadam Kebakaran	1.535.131.600	2.062.511.600	2.062.207.780	99,99
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	5.454.240.330	6.117.110.630	5.942.894.199	97,15
8	DISHUBKOMINFO	3.083.152.000	4.160.578.865	4.016.372.961	96,53
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	6.757.884.750	8.299.027.400	7.897.798.980	95,17
10	BLH	1.670.166.400	2.894.945.604	2.828.918.454	97,72
11	DISDUKCAPIL	943.279.000	1.156.390.175	1.127.790.751	97,53
12	Badan KB & PP	1.813.197.400	2.706.221.900	2.646.018.825	97,78
13	Dinas Pemuda & Olahraga	1.212.422.350	2.132.790.000	2.056.723.211	96,43
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	1.175.127.000	1.267.957.000	1.133.405.109	89,39
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.691.069.700	3.208.079.700	3.160.064.340	98,50
16	Sekretariat Daerah	21.980.211.890	30.472.046.750	27.688.637.029	90,87
17	DPPKAD	20.138.181.530	25.840.309.970	24.929.617.994	96,48
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	1.068.987.413	1.394.238.828	1.328.550.781	95,29
19	BKD	5.004.928.900	5.989.777.900	5.622.373.062	93,87
20	BPBD	1.069.237.375	1.423.084.625	1.381.583.140	97,08
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	11.838.058.750	13.317.124.050	13.236.068.030	99,39
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	5.068.033.245	6.835.115.368	5.746.532.383	84,07
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2.525.410.375	2.936.649.725	2.901.137.229	98,79
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	5.704.902.873	6.235.514.873	5.335.696.969	85,57
25	Sekretariat DPRD	18.563.987.730	23.190.233.550	21.701.065.050	93,58

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Rendahnya persentase capaian realisasi pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan disebabkan beberapa kegiatan yang pendanaannya berasal dari perubahan APBD tidak terlaksana pada akhir tahun 2014, seperti belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja jasa kantor, belanja jasa narasumber/tenaga ahli, serta belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS.

Capaian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2015 pada setiap SKPD Pemda Kota Palu berbeda satu sama lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	8.704.569.487	15.855.312.320	14.997.341.674	94,59
2	Dinas Kesehatan	16.621.527.010	41.586.211.900	21.573.217.959	51,88
3	RSU Anutapura	88.104.960.770	130.627.185.600	109.038.896.224	83,47
4	Dinas Pekerjaan Umum	7.147.127.225	8.031.547.925	7.720.752.303	96,13
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	4.143.705.220	4.236.776.708	4.236.776.708	100,00
6	Kantor Pemadam Kebakaran	1.500.440.000	1.544.930.925	1.482.744.644	95,97
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	6.020.824.800	5.615.460.668	5.151.307.767	91,73
8	DISHUBKOMINFO	3.098.280.200	3.338.114.000	3.283.341.195	98,36
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	6.330.952.571	7.011.663.065	6.276.181.589	89,51
10	BLH	2.562.072.600	3.334.444.250	2.647.594.874	79,40
11	DISDUKCAPIL	936.684.000	825.520.700	703.988.894	85,28
12	Badan KB & PP	1.369.259.210	2.093.926.710	1.721.962.711	82,24
13	Dinas Pemuda & Olahraga	1.655.592.875	2.177.498.000	2.144.581.273	98,49
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	1.172.140.550	1.185.599.875	1.109.082.546	93,55
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.557.164.006	1.910.743.900	1.905.921.508	99,75
16	Sekretariat Daerah	22.281.758.920	26.595.134.810	22.875.371.625	86,01
17	DPPKAD	5.634.132.301	6.332.819.399	6.332.819.399	100,00
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	1.248.235.377	1.004.103.777	977.076.392	97,31
19	BKD	4.445.795.999	4.825.161.999	4.576.622.702	94,85
20	BPBD	937.805.100	991.264.900	876.107.886	88,38
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	31.941.219.740	36.188.548.814	35.973.516.792	99,41
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	3.836.469.755	3.842.163.275	3.774.027.607	98,23
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2.430.232.050	2.283.429.000	2.269.750.848	99,40
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	3.856.944.300	4.195.894.300	3.677.753.411	87,65
25	Sekretariat DPRD	17.387.756.670	17.056.268.390	14.350.120.808	84,13

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Rendahnya persentasi capaian realisasi pada Dinas Kesehatan disebabkan beberapa kegiatan yang pendanaannya berasal dari perubahan APBD tidak terlaksana pada akhir tahun 2015, hal ini juga disebabkan kegiatan perjalanan dinas tidak terealisasi seluruhnya sesuai dengan perubahan APBD. Berdasarkan data terlihat bahwa realisasi anggaran belanja barang dan jasa SKPD Pemda Kota Palu, mengalami gejala fluktuasi pada tiga tahun penelitian (2013-2015).

Deskripsi Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi anggaran belanja modal yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup realisasi anggaran belanja modal SKPD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada 25 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2013 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu rata-rata mencapai 89,52%, seperti tergambar pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Belanja Modal Tahun 2013 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	62.360.306.074	74.744.335.000	64.826.213.895	86,73
2	Dinas Kesehatan	4.492.636.367	5.395.272.195	5.363.902.085	99,42
3	RSU Anutapura	105.721.144.842	107.033.048.272	84.481.592.578	78,93
4	Dinas Pekerjaan Umum	36.882.422.079	43.585.563.175	38.405.780.160	88,12
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	5.015.824.500	5.084.643.000	3.329.885.685	65,49
6	Kantor Pemadam Kebakaran	390.670.900	2.391.870.900	2.303.370.900	96,30
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	482.930.000	689.070.000	679.914.998	98,67
8	DISHUBKOMINFO	1.863.733.547	2.288.103.335	2.278.818.045	99,59
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	5.129.100.000	5.637.884.150	5.634.446.000	99,94
10	BLH	1.363.327.496	910.827.496	777.680.351	85,38
11	DISDUKCAPIL	244.022.600	465.279.426	447.257.600	96,13
12	Badan KB & PP	938.758.550	1.070.314.350	1.002.909.050	93,70
13	Dinas Pemuda & Olahraga	215.017.600	479.307.600	463.132.000	96,63
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	285.200.000	289.545.000	288.620.000	99,68
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	15.100.000	70.080.000	69.225.000	98,78
16	Sekretariat Daerah	5.430.411.625	22.088.309.156	17.225.699.800	77,99
17	DPPKAD	3.797.622.500	6.147.755.295	5.917.492.795	96,25
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	219.635.000	487.244.000	483.014.550	99,13
19	BKD	219.934.900	262.984.900	254.266.900	96,68
20	BPBD	23.266.000	137.355.600	130.536.360	95,04
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	30.620.000	160.842.500	160.717.500	99,92
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	6.351.485.840	6.402.898.340	6.249.454.503	97,60
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	528.388.600	603.243.075	577.110.500	95,67
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	2.394.803.000	3.048.226.475	2.932.285.200	96,20
25	Sekretariat DPRD	1.492.466.650	1.579.240.275	1.511.110.250	95,69

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Rendahnya persentasi capaian realisasi pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan disebabkan beberapa penawaran belanja modal pengadaan konstruksi bangunan tidak sesuai dengan perubahan APBD.

Capaian realisasi belanja modal tahun 2014 pada setiap SKPD Pemda Kota Palu berbeda satu sama lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	48.014.976.170	56.457.185.270	51.514.454.782	91,25
2	Dinas Kesehatan	14.764.347.440	18.146.654.480	16.418.550.111	90,48
3	RSU Anutapura	30.207.875.860	31.200.844.050	30.578.183.771	98,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	47.987.712.500	92.782.156.950	90.588.629.680	97,64
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	10.418.663.000	10.689.421.330	5.799.100.002	54,25
6	Kantor Pemadam Kebakaran	137.518.400	516.438.400	510.357.000	98,82
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	451.975.170	681.980.970	681.470.750	99,93
8	DISHUBKOMINFO	3.586.800.000	4.821.782.135	4.810.413.135	99,76
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	747.143.250	7.557.749.100	5.155.814.350	68,22
10	BLH	955.772.600	940.697.396	901.788.400	95,86
11	DISDUKCAPIL	2.650.000	455.440.825	454.797.000	99,86
12	Badan KB & PP	844.094.600	1.045.350.100	1.015.835.500	97,18
13	Dinas Pemuda & Olahraga	1.092.160.000	1.356.810.000	1.356.524.001	99,98
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	69.700.000	548.850.000	511.343.000	93,17
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	70.300.000	133.050.000	133.050.000	100,00
16	Sekretariat Daerah	8.704.436.142	25.320.504.820	22.519.729.973	88,94
17	DPPKAD	6.429.532.105	9.431.264.650	9.431.264.650	100,00
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	315.560.364	489.708.949	479.539.949	97,92
19	BKD	453.880.000	558.698.000	553.315.350	99,04
20	BPBD	156.630.625	424.566.375	399.474.062	94,09
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	90.940.000	364.881.100	358.781.100	98,33
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	5.896.477.210	6.235.670.922	6.235.670.922	100,00
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	51.599.625	182.371.175	181.771.175	99,67
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	7.637.606.752	10.007.189.750	9.585.885.481	95,79
25	Sekretariat DPRD	3.631.617.270	4.194.271.450	3.820.444.850	91,09

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Rendahnya persentase capaian realisasi pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan disebabkan beberapa pengadaan yang berasal dari perubahan APBD seperti belanja modal pengadaan konstruksi bangunan dan belanja

modal pengadaan instalasi listrik dan telepon tidak seluruhnya terealisasi.

Capaian realisasi belanja modal Tahun 2015 pada setiap SKPD Pemda Kota Palu berbeda satu sama lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Belanja Modal Tahun 2015 (dalam rupiah)

NO	SKPD	APBD Pokok	APBD Perubahan	Realisasi	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	35.133.444.269	30.618.255.270	25.617.519.380	83,67
2	Dinas Kesehatan	7.211.057.713	14.201.172.439	14.201.172.439	100,00
3	RSU Anutapura	12.523.663.980	14.370.791.470	13.758.088.691	95,74
4	Dinas Pekerjaan Umum	59.145.543.180	146.990.634.500	142.285.659.694	96,80
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	8.167.306.680	8.575.483.630	7.142.059.054	83,28
6	Kantor Pemadam Kebakaran	40.000.000	77.599.000	77.599.000	100,00
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	375.838.155	436.698.287	433.330.287	99,23
8	DISHUBKOMINFO	3.919.263.200	4.280.994.400	4.220.266.985	98,58
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	3.028.676.429	3.031.000.935	2.953.178.629	97,43
10	BLH	193.026.000	148.574.350	147.810.600	99,49
11	DISDUKCAPIL	58.239.000	382.934.300	376.998.000	98,45
12	Badan KB & PP	994.592.790	985.670.290	911.153.000	92,44
13	Dinas Pemuda & Olahraga	285.397.125	164.690.000	162.320.000	98,56
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	221.921.150	226.161.150	223.006.000	98,60
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	5.000.000	1.800.000	1.800.000	100,00
16	Sekretariat Daerah	7.193.028.903	13.074.111.010	11.727.050.700	89,70
17	DPPKAD	1.402.679.500	2.213.021.250	2.123.569.900	95,96
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	158.918.000	253.201.000	253.201.000	100,00
19	BKD	100.100.387	394.780.387	387.500.000	98,16
20	BPBD	71.564.900	64.037.600	42.369.400	66,16
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	432.705.000	44.395.000	44.395.000	100,00
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	9.126.806.500	9.105.722.980	8.864.156.083	97,35
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	32.744.000	104.365.000	90.587.500	86,80
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	2.006.660.025	2.536.660.025	2.531.019.500	99,78
25	Sekretariat DPRD	1.608.941.874	1.958.242.550	1.958.242.550	100,00

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Rendahnya persentasi capaian realisasi pada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) disebabkan beberapa pengadaan belanja modal peralatan dan mesin yang berasal dari perubahan APBD tidak tercapai pada akhir tahun 2015. Berdasarkan data terlihat bahwa realisasi anggaran belanja modal SKPD Pemda Kota Palu, mengalami gejala fluktuasi pada tiga tahun penelitian (2013-2015).

Selisih Perubahan Anggaran

Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Setiap satuan kerja menyusun perubahan anggaran yang terdiri dari penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan satuan kerja untuk merealisasikannya.

Selisih perubahan APBD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini merupakan selisih dari anggaran setelah perubahan APBD tahun berjalan dengan anggaran murni/pokok dari keseluruhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal bulan Januari hingga Desember dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada 25 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.

Terdapat peningkatan nilai selisih perubahan anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pada tiap-tiap SKPD dikarenakan meningkatnya kegiatan tiap tahunnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu. Dinas Kesehatan yang mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2014 sebesar 114,66 %. Terlihat bahwa rata-rata nilai selisih perubahan anggaran pada SKPD Pemda Kota Palu mengalami kenaikan sebesar 49,82 % pada tahun 2013 ke tahun 2014, seperti yang terlihat pada tabel 10.

Tabel 10. Selisih APBD Pokok dengan APBD Perubahan Tahun 2013 dan 2014 (dalam rupiah)

NO	SKPD	Selisih		Persentase Penambahan (%)
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	
1	Dinas Pendidikan	14.161.212.600	11.047.037.921	(28,19)
2	Dinas Kesehatan	(1.183.362.640)	8.072.843.999	114,66
3	RSU Anutapura	2.910.345.754	26.441.981.830	88,99
4	Dinas Pekerjaan Umum	7.463.687.000	46.076.000.000	83,80
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	1.155.243.150	339.360.330	(240,42)
6	Kantor Pemadam Kebakaran	2.819.165.000	1.263.170.000	(123,18)
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	800.000.000	596.853.100	(34,04)
8	DISHUBKOMINFO	1.087.000.000	2.614.700.000	58,43
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	2.625.322.950	8.572.000.000	69,37
10	BLH	440.000.000	1.197.204.000	63,25
11	DISDUKCAPIL	373.401.926	655.030.000	42,99
12	Badan KB & PP	903.316.000	1.114.500.000	18,95
13	Dinas Pemuda & Olahraga	691.491.000	1.189.067.650	41,85
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	282.000.000	956.700.000	70,52
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	900.000.000	789.000.000	(14,07)
16	Sekretariat Daerah	25.000.000.000	26.170.279.698	4,47
17	DPPKAD	11.446.414.932	9.564.519.985	(19,68)
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	809.000.000	496.250.000	(63,02)
19	BKD	783.840.000	1.411.750.000	44,48
20	BPBD	459.100.000	650.000.000	29,37
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	1.192.972.000	2.628.821.400	54,62
22	Dinas Pertanian, Kehutanan & Kelautan	633.820.000	2.116.103.835	70,05
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	600.000.000	599.817.900	(0,03)
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	1.136.000.000	2.826.479.998	59,81
25	Sekretariat DPRD	4.168.149.679	5.352.030.000	22,12
Rata-Rata		3.266.324.774	6.509.660.066	49,82

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Tahun 2014-2015, terdapat pening-katan nilai selisih perubahan anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 pada tiap-tiap SKPD dikarenakan meningkatnya kegiatan tiap tahunnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu. Dinas Kesehatan yang mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2015 sebesar 75,3

%. Ter-lihat bahwa rata-rata nilai selisih perubahan anggaran pada SKPD Pemda Kota Palu mengalami kenaikan sebesar 21,19 % pada tahun 2014 ke tahun 2015, seperti yang terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Selisih APBD Pokok dengan APBD Perubahan Tahun 2014 dan 2015 (dalam rupiah)

NO	SKPD	Selisih		Persentase Penambahan (%)
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	
1	Dinas Pendidikan	11.047.037.921	2.517.467.834	(338,82)
2	Dinas Kesehatan	8.072.843.999	32.324.944.616	75,03
3	RSU Anutapura	26.441.981.830	44.557.054.320	40,66
4	Dinas Pekerjaan Umum	46.076.000.000	88.855.832.020	48,15
5	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	339.360.330	544.608.438	37,69
6	Kantor Pemadam Kebakaran	1.263.170.000	149.998.925	(742,12)
7	BAPPEDA & Penanaman Modal	596.853.100	374.357.484	(59,43)
8	DISHUBKOMINFO	2.614.700.000	922.025.000	(183,58)
9	Dinas Kebersihan & Pertamanan	8.572.000.000	1.391.196.000	(516,16)
10	BLH	1.197.204.000	719.920.000	(66,30)
11	DISDUKCAPIL	655.030.000	189.930.000	(244,88)
12	Badan KB & PP	1.114.500.000	806.210.000	(38,24)
13	Dinas Pemuda & Olahraga	1.189.067.650	413.198.000	(187,77)
14	Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	956.700.000	35.679.325	(2.581,38)
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	789.000.000	612.849.894	(28,74)
16	Sekretariat Daerah	26.170.279.698	10.958.209.997	(138,82)
17	DPPKAD	9.564.519.985	14.542.183.049	34,23
18	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	496.250.000	(170.473.600)	(391,10)
19	BKD	1.411.750.000	747.779.500	(88,79)
20	BPBD	650.000.000	47.802.500	(1.259,76)
21	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan	2.628.821.400	4.435.096.074	40,73
22	Dinas Pertanian, Kehutanan &	2.116.103.835	19.105.800	(10.975,71)
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	599.817.900	(38.272.050)	(1.667,25)
24	Dinas PERINDAKOP dan UKM	2.826.479.998	1.709.260.000	(65,36)
25	Sekretariat DPRD	5.352.030.000	(171.162.604)	(3.226,87)
Rata-Rata		6.509.660.066	8.259.792.021	21,19

Sumber: DPPKAD Kota Palu, data diolah.

Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi berganda menggunakan program SPSS 17.0, adapun hasil pengujian seperti ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Analisis Berganda

Variabel	Beta	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
(Constant)	3,254			
B. Pegawai	0,237	3,211	0,002	Signifikan
B. Barang dan Jasa	0,088	1,119	0,267	Tidak Signifikan
B. Modal	0,570	7,628	0,000	Signifikan
R	0,795			
Adj R Square	0,605			
F hitung	23,638			
Sig. F	0,00			
α	0,05			

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 11, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,254 + 0,237 X_1 + 0,088 X_2 + 0,570 X_3$$

PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

Hasil Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2006).

Hasil analisis regresi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 23,638 dengan

probabilitas signifikan sebesar 0,00 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Oleh karena itu, penelitian ini menerima Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berpengaruh Signifikan Terhadap Selisih Perubahan Anggaran Pada Skpd Pemda Kota Palu.

Hasil Uji Statistik t

Hasil Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Berdasarkan hasil analisis regresi, tampak bahwa 2 (dua) variabel bebas yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Selisih Perubahan Anggaran, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan 0,000. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari pada tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Oleh karena itu, penelitian ini *menerima Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Selisih Perubahan Anggaran serta menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Selisih Perubahan Anggaran.*

Sedangkan satu variabel bebas yaitu Belanja Barang dan Jasa berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu Selisih Perubahan Anggaran, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,267. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari pada tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, penelitian ini *menolak Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa berpengaruh tidak signifikan terhadap Selisih Perubahan Anggaran.*

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Namun karena jumlah variabel bebas lebih dari dua maka lebih baik digunakan *Adjusted Rsquare*, yang bernilai 0,605 (Hasil ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh (kontribusi) variabel bebas realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap selisih perubahan anggaran sebesar 0,605 atau 60,5%.

Pengaruh Realisasi Belanja Pegawai (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2) serta Belanja Modal (X3) Terhadap Selisih Perubahan Anggaran (Y) pada SKPD Pemda Kota Palu

Berdasarkan hasil olah data statistik bahwa realisasi anggaran belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran pada SKPD Pemda Kota Palu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sakina (2007) menyatakan bahwa realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran biaya tambahan.

Perubahan anggaran oleh satuan kerja yang membutuhkan, atau merupakan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam penetapannya harus mempertimbangkan kemampuan satuan kerja untuk merealisasikannya. Baik dari aspek kemampuan untuk mendapatkan sumber pembiayaan, maupun kemampuan sumber daya lainnya, seperti aparat, sistem, dan kebijakan dalam merealisasikan kegiatan yang menggunakan perubahan anggaran.

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Kuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang membagi belanja daerah menjadi dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam menetapkan perubahan APBD dapat dilakukan dengan melihat realisasi belanja daerah tahun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara realisasi belanja daerah terhadap selisih perubahan anggaran.

Strategi dalam melakukan perubahan APBD yang didasari atas realisasi belanja, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan kegiatan, juga diarahkan kepada peningkatan proporsi belanja yang mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan pengalokasian belanja dimaksud tetap dapat mendukung program dan kegiatan strategis SKPD Pemda Kota Palu.

Pengaruh Realisasi Belanja Pegawai (X1) Terhadap Selisih Perubahan Anggaran (Y) pada SKPD Pemda Kota Palu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, yang berarti bahwa semakin besar realisasi anggaran belanja pegawai maka semakin besar pula jumlah selisih perubahan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mustaqim (2011) yang menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif.

Realisasi anggaran belanja pegawai yang berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Akuntansi DPPKAD yang memberikan kesimpulan bahwa realisasi belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang telah selesai tepat waktu dan sudah ada outputnya akan menerima

honorarium dari kegiatan tersebut serta langsung dibayarkan kepada pelaksana kegiatan.

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pegawai secara parsial memberikan dampak yang signifikan terhadap alokasi selisih perubahan anggaran. Artinya bahwa realisasi anggaran belanja pegawai berdampak nyata terhadap besarnya selisih perubahan anggaran. Secara keseluruhan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 realisasi anggaran belanja pegawai pada SKPD Pemda Kota Palu dengan besarnya penggunaan/realisasi sebesar 94,57% dari keseluruhan total anggaran setelah perubahan APBD untuk belanja pegawai.

Pengaruh Realisasi Belanja Barang dan Jasa (X2) Terhadap Selisih Perubahan Anggaran (Y) pada SKPD Pemda Kota Palu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja barang dan jasa berpengaruh tidak signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sakina (2007) yang menyatakan bahwa variabel realisasi belanja daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi anggaran biaya tambahan.

Realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang berpengaruh tidak signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Akuntansi DPPKAD yang memberikan kesimpulan bahwa realisasi belanja barang dan jasa berpengaruh tidak signifikan terhadap selisih perubahan anggaran disebabkan oleh belanja barang dan jasa lebih bersifat rutinitas, terukur, terencana dari tahun ketahun sehingga perubahan anggarannya sangat kecil.

Apabila dirujuk pada data realisasi belanja daerah yang terjadi pada periode 2013-2015 nampak bahwa realisasi belanja barang dan jasa mengalami fluktuasi, rata-rata SKPD memiliki realisasi belanja barang dan jasa di bawah 100% dari anggaran yang telah disediakan, yang artinya SKPD sangat berhati-hati serta kurang memahami dalam melakukan pembelanjaan pada periode triwulan I sampai dengan triwulan

III, sehingga perubahan anggaran atau alokasi anggaran biaya tambahan tidak dapat menjadikan realisasi belanja daerah sebagai patokan karena nilai realisasi belanja barang dan jasa yang tidak realistis disebabkan selain rendahnya tingkat realisasi anggaran juga disebabkan penggunaan anggaran yang selalu mengalami penundaan terkait dengan lambatnya pengesahan APBD sebelum perubahan, maupun laporan perhitungan tahun sebelumnya yang belum rampung.

Secara keseluruhan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 realisasi anggaran belanja barang dan jasa pada SKPD Pemda Kota Palu sebesar 92,37% dari keseluruhan total anggaran setelah perubahan APBD untuk belanja barang dan jasa.

Pengaruh Realisasi Belanja Modal (X3) Terhadap Selisih Perubahan Anggaran (Y) pada SKPD Pemda Kota Palu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja modal berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, yang berarti bahwa semakin besar realisasi anggaran belanja modal maka semakin besar pula jumlah selisih perubahan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cipta Fattah (2012) yang menyatakan bahwa variabel realisasi anggaran belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penetapan pagu indikatif. Realisasi anggaran belanja modal yang berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran, juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Akuntansi DPPKAD yang memberikan kesimpulan bahwa realisasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap selisih perubahan anggaran disebabkan belanja modal yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan utang terhadap pihak ketiga yang dibayar di akhir tahun.

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja modal secara parsial memberikan dampak yang signifikan terhadap selisih perubahan anggaran. Artinya bahwa realisasi anggaran belanja modal berdampak nyata terhadap besarnya selisih

perubahan anggaran. Secara keseluruhan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 realisasi anggaran belanja modal pada SKPD Pemda Kota Palu dengan besar-nya penggunaan/realisasi sebesar 94,12% dari keseluruhan total anggaran setelah perubahan APBD untuk belanja modal.

Penyerapan realisasi belanja modal yang tinggi menandakan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan di sisi belanja secara lebih efisien dan efektif sehingga kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai akan terpenuhi dan stimulasi dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian daerah dapat terwujud.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal menunjukkan perkembangan setiap tahunnya walaupun ada beberapa SKPD yang mengalami fluktuasi bahkan realisasinya menurun, akan tetapi dengan adanya perubahan APBD akan meningkatkan nilai selisih perubahan anggarannya.
2. Realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal secara simultan memberikan pengaruh signifikan (secara nyata) terhadap selisih perubahan anggaran pada SKPD Pemda Kota Palu.
3. Realisasi anggaran belanja pegawai memberikan pengaruh signifikan (secara nyata) terhadap selisih perubahan anggaran pada SKPD Pemda Kota Palu.
4. Realisasi anggaran belanja barang dan jasa memberikan pengaruh tidak signifikan (tidak secara nyata) terhadap selisih perubahan anggaran pada SKPD Pemda Kota Palu.
5. Realisasi anggaran belanja modal memberikan pengaruh signifikan (secara

nyata) terhadap selisih perubahan anggaran pada SKPD Pemda Kota Palu.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan anggaran setelah perubahan APBD untuk membiayai program dan kegiatan sebaiknya berdasarkan capaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja tiap-tiap SKPD dan untuk menghindari pengalokasian anggaran belanja yang mengakibatkan pemborosan;
2. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana kegiatan di tahun berjalan, harus diikuti dengan revisi APBD. Hal ini dimaksudkan agar selisih antara anggaran setelah perubahan APBD dan realisasi belanja dapat diminimalisir.
3. Sebaiknya SKPD dalam menetapkan perubahan APBD lebih realistis dan diarahkan pada program-program kerja yang diprioritaskan agar dalam merealisasikannya dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, SE., M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Moh. Iqbal A, SE., Ak., M.Si. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Syukriy. 2013. *Perubahan APBD*. Melalui <<http://www.syukriy.wordpress.com>> [2/9/15].

Cipta Fattah, Wira. 2012. *Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa serta Realisasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Penetapan Pagu Indikatif di Universitas Tadulako*. Tesis S-2. Palu: Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako.

Dewi, Adha. 2006. *Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mustaqim, Karim. 2011. *Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penetapan Pagu Indikatif Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. Tesis S-2. Palu: Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Sakina. 2007. *Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Terhadap Alokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Pada Instansi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. Tesis

S-2. Palu: Program Pasca Sarjana
Universitas Tadulako.

Sari, N. P. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Riau.* Melalui
<<http://kampoengakuntansi.blogspot.com>
> [18/12/15]

Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen.*
Bandung: AlfaBeta

Syaiful. 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.* Melalui
<<http://www.bappenas.go.id>> [2/10/15]

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.